

ABSTRAK

Penyakit AIDS yang disebabkan oleh virus HIV merupakan isu kesehatan yang menjadi perhatian global. Di Indonesia pada triwulan pertama tahun 2017 jumlah kasus HIV sebanyak 10.376 dan kasus AIDS sebanyak 673. DIY merupakan kota pariwisata dan kota pelajar yang memiliki tingkat pergerakan manusia yang tinggi sehingga sangat berkemungkinan terjadinya perilaku-perilaku yang berisiko tertular maupun menularkan HIV dan AIDS. Oleh karena itu dibutuhkan *collaborative governance* antar *stakeholder* dalam melakukan penanggulangan HIV dan AIDS. Ada delapan indikator untuk melihat keberhasilan *collaborative governance* menurut DeSeve: *Networked Structure, Commitment to a Common Purpose, Trust Among The Participant, Governance, Access to Authority, Distributive Accountability/Responsibility, Information Sharing, Access to Resources*. Temuan dari penelitian ini adalah kerjasama lintas sektoral yang dilakukan belum memiliki peraturan sebagai pedoman dalam melaksanakan kolaborasi tersebut. Sehingga kerjasama tersebut hanya pada tahap saling terlibat dalam penanggulangan HIV dan AIDS, belum pada tahap kerjasama resmi yang memiliki legalitas. Sebab, adanya aturan dasar merupakan hal penting dalam *collaborative governance* sebagai landasan awal dan legitimasi bagi para *stakeholder* yang bertindak. Kemudahan dalam mengakses informasi, transparansi dan berbagi informasi para *stakeholder* yang terlibat dalam kerjasama ini akan berpengaruh kepada terlaksananya program dan kegiatan kerjasama lintas sektoral tersebut. Dengan berbagi informasi, kemudahan akses informasi maka koordinasi akan berjalan dengan lancar, dan kerjasama yang transparan menunjukkan bahwa pelaksanaan penanggulangan HIV dan AIDS ini dapat dipertanggungjawabkan dan terlaksana sesuai dengan yang seharusnya.

Kata kunci: *Collaborative Governance, Stakeholder, Penanggulangan HIV dan AIDS*

ABSTRACT

AIDS caused by HIV is a health issue of global concern. In Indonesia, in the first quarter of 2017, the number of HIV cases was 10,376 and AIDS cases were 673. DIY is a tourism city and student city that has a high level of human movement so it is highly likely that behaviors that are at risk of contracting or transmitting HIV and AIDS. Therefore, collaborative governance among stakeholders is needed in HIV and AIDS prevention. There are eight indicators to see the success of collaborative governance according to DeSeve: Networked Structure, Commitment to a Common Purpose, Trust Among the Participants, Governance, Access to Authority, Distributive Accountability / Responsibility, Information Sharing, Access to Resources. The findings of this study are that cross-sectoral collaboration carried out does not yet have regulations as a guideline in carrying out such collaboration. So that cooperation is only at the stage of mutual involvement in HIV and AIDS prevention, not at the stage of official cooperation that has legality. Because the existence of basic rules is important in collaborative governance as the initial foundation and legitimacy for stakeholders who act. The ease of accessing information, transparency and information sharing among the stakeholders involved in this collaboration will affect the implementation of cross-sectoral programs and activities. By sharing information, easy access to information, coordination will run smoothly, and transparent cooperation shows that the implementation of HIV and AIDS prevention can be accounted for and carried out accordingly.

Keywords: Collaborative Governance, Stakeholders, HIV and AIDS Prevention